

Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Jambi

Sutrisno dan Muhammad Rusdi

Abstract: *This research is focused on analyzing the policy of education improvement quality. Based on the research on policy, using approach model on policy research, and the analysis in input, process, and output related to decision makers, it is found that there are difficulties in mechanism and technical problems in making policies, due to lack of understanding in variable of quality improvement of education. The result shows of policy in quality improvement education specifically in basic, junior and senior education level in Jambi Province. Based on model of education policy re-research analytical in input, process and out put as well as related to dicession makers, indicating that there are difficulties in mechanism and technical problems to make policies due to lack of understand-ing in variable of a quality improvement of education. The results shows that, there has not been made a regulation issued related to a quality improvement in education but it is made based on aggregate issue, so that a controlling in accountability management should be organized.*

Key Words: *policy in quality improvement, lack of understanding variables, aggregate issue*

Arah kebijakan pendidikan nasional dititikberatkan pada peningkatan mutu, otonomi, dan peningkatan daya saing bangsa. Daya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan penyelenggaraan pendidikan yang sanggup berkompetisi dalam hal kualitas dengan bangsa-bangsa lain. Beberapa komponen penting yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk itu di antaranya adalah penguasaan IPTEK bagi siswa dan sekaligus menjadi salah satu kunci keunggulan suatu bangsa di era globalisasi ini. Sementara itu, peningkatan sumber daya manusia merupakan faktor penentu lainnya sekaligus merupakan aset bangsa.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia kita cukup jauh tertinggal dari negara maju lainnya. Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang masih jauh tertinggal untuk kawasan Asia sekalipun. Hasil penelitian beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa di antara tujuh sampel di Asia ternyata Indonesia merupakan Negara

yang memiliki produktivitas tenaga kerja paling rendah.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah di Indonesia antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum, sistem evaluasi, sarana pendidikan, materi ajar, mutu guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Namun, upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal ini diindikasikan dengan nilai hasil evaluasi belajar untuk berbagai bidang studi pada jenjang SMP dan SMA yang cenderung tidak menunjukkan peningkatan yang berarti bahkan dapat dikategorikan konstan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Tedjasudhana (2000) merasa sangat prihatin dengan pendapat dari beberapa kalangan yang menyatakan bahwa standar kelulusan yang ditetapkan untuk UN yaitu 4,50 dianggap terlalu tinggi, padahal di Singapura nilai kelulusan adalah 6,5, di Malaysia 7, dan di Vietnam 5,5.

Dua faktor penting yang dapat menjelaskan

mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang berhasil, strategi pembangunan pendidikan lebih bersifat *input-oriented*, dan pengelolaan pendidikan lebih bersifat *macro-oriented*. Strategi *input-oriented* bahwa apabila semua input pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan buku paket dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan maka secara otomatis sekolah dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan, Strategi pengelolaan yang *macro-oriented* berarti bahwa pengelolaan pendidikan diatur terlalu dominan oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah).

Dari kenyataan di atas semakin menyadarkan kita bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan semata-mata, tetapi harus juga memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu, mengingat sekolah sebagai unit pelaksanaan pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik, tentunya harus mampu menyediakan layanan pendidikan yang beragam dan kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya.

Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, prasarana, sumber daya lainnya, dan penciptaan suasana yang kondusif. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis misalnya ulangan umum, Ebtan, atau Ebtanas dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni, atau keterampilan tambahan tertentu misalnya komputer, beragam jenis teknik, jasa, suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, dan kebersihan.

Terdapat 12 atribut yang diperlukan bagi jaminan mutu pendidikan yaitu komitmen, konsistensi, kompetensi, kontak, komunikasi, kredibilitas, rasa iba, kesantunan, kerjasama, kemampuan, keyakinan, dan watak kritis. Jika gagasan tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan maka pendidikan

baru dikatakan unggul jika 12 atribut tersebut hadir dan dilaksanakan secara mantap dan efektif. Namun sebagai konsekuensi penerapan 12 atribut tersebut, manajemen kualitas diusulkan mengikuti siklus yang berkelanjutan dengan melaksanakan *planning, training, actioning, monitoring, improving, dan reviewing* sebagai mata rantainya.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya, merupakan langkah yang tepat bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jambi untuk melakukan kajian kebijakan pendidikan sekolah dasar dan menengah di provinsi Jambi. Beberapa harapan utama hendaknya semua elemen yang terkait dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan manajemen pengelolaan pendidikan yang didasarkan paradigma baru.

METODE

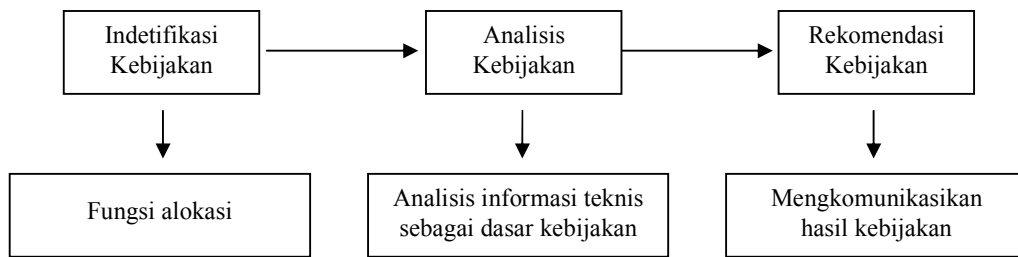
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kebijakan dengan menggunakan model pendekatan penelitian kebijakan, yakni dengan mengacu kepada kaidah-kaidah penelitian kebijakan. Dalam rangka mendapatkan informasi yang komprehensif, penelitian ini mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) membuat desain penelitian yang menggambarkan alur penelitian, (2) mendefinisikan dan menjabarkan variabel-variabel penting yang akan diteliti secara terperinci serta teknik memperoleh data, (3) metode pengumpulan data, (4) metode pengambilan sampel, (5) teknik analisis data, (6) waktu penelitian, dan (7) personal peneliti. Secara sederhana desain penelitian dalam penelitian kebijakan ini dilihat pada gambar 1.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi beberapa kebijakan strategis dan implementatif yang telah dan sedang dibuat oleh pemerintah kota/kabupaten di provinsi Jambi yang difokuskan dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Selanjutnya, aspek-aspek penting dimasukkan ke dalam prosedur analisis kebijakan. Oleh karena itu, variabel penelitian untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut: (1) memperoleh dokumen kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota/kabupaten tentang peningkatan mutu pendidikan, (2) mengidentifikasi persoalan yang ingin dipecahkan dari

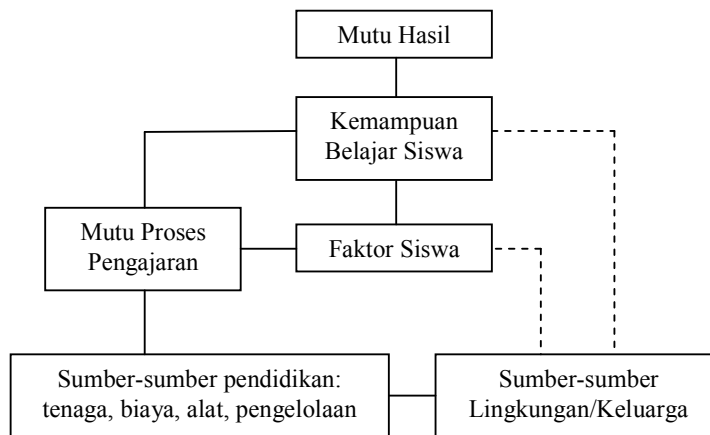
kebijakan, (3) membenaran keakuratan formulasi kebijakan yang sudah dirumuskan berdasarkan persoalan yang dihadapi, dan (4) melaksanakan program yang dibuat serta pemberian alternatif untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Data selengkapannya dapat dilihat pada tabel 1.

HASIL

Analisis dan interpretasi data dilakukan berdasar pada jenis sumber informasi yang diperoleh. Informasi ini selanjutnya diintegrasikan satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh informasi



Gambar 1. Desain Penelitian dalam Penelitian Kebijakan



Gambar 2. Faktor-faktor upaya peningkatan mutu hasil pendidikan

Tabel 1 Data, sumber data, dan metode pengumpulan data yang digunakan

Data yang Dibutuhkan		Sumber dan Metode
Variabel	Indikator	
Dokumen kebijakan dari Pemkot	Tersedianya Rencana Strategis (Restra)	Dokumen Renstra
	Visi dan misi peningkatan mutu, kebijakan, APBD	Surat keputusan, wawancara
	Implementasi program kebijakan dan kendalanya	Wawancara
Bapedda Kabupaten	Kebijakan peningkatan mutu pendidikan	Dokumen
	Perencanaan program peningkatan mutu pendidikan	Wawancara dan analisis dokumen
	Kebijakan tertulis yang telah dikeluarkan	Wawancara dan analisis dokumen
	Strategi pelaksanaan serta alokasi dana dan sumber daya	Wawancara dan analisis dokumen
	Pemberdayaan sumberdaya yang ada	Wawancara dan analisis dokumen
Diknas Kabupaten	Renstra, visi dan misi	Wawancara dengan Diknas
	Kebijakan tertulis tentang peningkatan mutu pendidikan	Wawancara dan analisis dokumen
	Perencanaan program yang terdokumentasi	Wawancara dan analisis dokumen
	Pelaksanaan program untuk melaksanakan kebijakan	Wawancara dan analisis dokumen

akurat yang mengacu kepada ketiga isu pokok pendidikan nasional yang berkembang dewasa ini. Secara skematis tentang mutu hasil pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 berpedoman kepada kerangka dasar (*frame work*) PP. No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat 1 yaitu tentang Lingkup Standar Nasional Pendidikan. Data yang diperoleh dari kabupaten selanjutnya dianalisis dengan dasar pertimbangan tiap-tiap daerah memiliki karakteristik berbeda yakni beberapa faktor penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Keaneekaragaman dalam kebijakan peningkatan mutu pendidikan ini merupakan bahasan yang menarik untuk dianalisis dan dicermati sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Analisis Kebijakan

Kebijakan Provinsi Jambi

Kebijakan pendidikan oleh pemerintah provinsi Jambi belum mencerminkan adanya komitmen peningkatan mutu secara keseluruhan. Peraturan-peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah belum ada. Kebijakan yang dikeluarkan dalam bidang pendidikan sifatnya masih terkait dengan kebutuhan jangka pendek, misalnya penggabungan sekolah dasar yang kurang produktif dan belum tersedianya pemetaan sekolah sesuai dengan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan pembiayaan pendidikan, pada prinsipnya telah memenuhi amanat undang-undang yakni menganggarkan biaya pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun persentase tersebut masih bersifat global di mana sebagian besar dana yang tersedia digunakan untuk belanja rutin misalnya gaji guru dan pegawai.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam hal peningkatan mutu pendidikan adalah upaya meningkatkan persentase anggaran serta belum adanya kebijakan pengelolaan sekolah yang dikelola secara kompetitif. Upaya antisipasi sekolah dalam merespon kurikulum yang dinamis belum menjadi kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap aspek perencanaan pendidikan. Bappedda belum menetapkan sasaran skala prioritas pendidikan yang mengacu kepada peningkatan mutu secara menyeluruh. Arah kebijakan pendidikan yang diutamakan masih pada tataran pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Contohnya, pengalokasian dana pendidikan berorientasi jangka pendek yakni perbaikan sekolah, pembangunan sarana fisik yang belum mengarah kepada perencanaan makro dalam bidang pendidikan yakni meliputi perbaikan input, pengembangan karier guru, pemenuhan sarana laboratorium, peningkatan efisiensi sistem pembelajaran, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Perencanaan kebutuhan tenaga pendidikan (teknisi, laboran, dan guru) belum sinergis dengan lembaga pendidikan, dalam hal ini Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ada. Padahal, semua jenis kegiatan baik *inservice training* maupun peningkatan kualifikasi pendidik sangat erat kaitannya dengan LPTK, terutama pemenuhan tenaga guru dan teknisi/laboran. Data menunjukkan bahwa jumlah pelamar untuk menjadi guru sudah mengindikasikan *over supply* yang artinya rekomendasi kongkrit kepada LPTK tentang penyediaan guru sangat dibutuhkan. Dalam hal ini jelas bahwa belum ada sinkronisasi antara LPTK dengan pengguna yaitu tenaga guru di daerah.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas merespon tentang semua kebijakan pendidikan yang diusulkan oleh pemerintah jika kondisi saat ini belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini bergantung kepada inisiatif dari pihak eksekutif. Sejauh ini belum ada produk hukum yang telah dihasilkan secara bersama-sama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Harapan bagi DPRD adalah kesinergian dan bersama-sama pro aktif dalam membuat program serta kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Peran Dewan Pendidikan

Peran serta dewan pendidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang memiliki akuntabilitas, transparansi yang tinggi, dan akreditasi sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat serta keterlibatan dewan pendidikan sangat dibutuhkan. Beberapa peran penting yang harus dijalankan oleh dewan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai mediator, memberikan sumbangan pemikiran, serta keterlibatan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Merujuk kepada peran dan fungsinya, pemerintah provinsi Jambi telah melibatkan dewan pendidikan secara optimal dalam hal membuat kebijakan pendidikan.

Namun, ada beberapa aspek penting yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Di antaranya peran dewan pendidikan terhadap keterlibatan dalam kriteria penentuan tenaga kependidikan, pemilihan guru/tutor yang berprestasi, pengawas, kepala sekolah, serta kegiatan *monitoring* penyelenggaraan pendidikan, output pendidikan, dan aspek pengembangan pendidikan yang berbasis mutu untuk yang akan datang.

Kebijakan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), ada beberapa program yang telah dikembangkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Program tersebut adalah: **pertama**, penempatan guru. Penempatan ini harus disesuaikan dengan bidangnya disertai pengembangan karier guru melalui penataran/pelatihan untuk saling tukar informasi dari guru senior ke guru junior. Program ini hanya dapat berjalan dengan baik untuk sekolah-sekolah yang berada di ibukota kabupaten, sedangkan untuk sekolah di daerah terpencil masih banyak ditemukan para guru yang mengajar di luar bidang studinya.

Kedua, pemerintah akan membangun jaringan sistem informasi. Sistem ini memungkinkan dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di samping itu, dikembangkan program perbaikan sarana dan prasarana sekolah meliputi bangunan fisik, laboratorium, alat peraga, serta biaya perawatan sekolah.

Dalam bidang pengembangan kesiswaan, Diknas telah mengikutkan siswa-siswinya ke dalam berbagai kegiatan olimpiade dan beberapa kegiatan akademik lainnya baik atas dasar inisiatif sekolah maupun inisiatif dari Diknas. Selanjutnya, dalam hal peningkatan mutu lulusan ditargetkan jumlah kelulusan siswa sesuai dengan standar nasional yakni hasil UN 4,25 serta persentase kelulusan meningkat.

Kendatipun demikian masih ada beberapa program yang belum dilaksanakan secara serius diantaranya: (1) kebijakan secara sinergis dengan instansi terkait misalnya dengan Bappeda dan perguruan tinggi tentang penganggaran dan tindak lanjut lulusan siswa, (2) menelaah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara bersama-sama tiap bidang studi, dan (3) program stimulasi peningkatan peran komite sekolah dalam desentralisasi pendidikan dan pemberdayaan potensi peserta didik serta kebijakan dan pengembangan program yang terkait dengan sertifikasi guru.

Peran Komite Sekolah

Peran serta komite sekolah yang sangat aktif sangatlah dibutuhkan oleh sekolah dalam rangka menyalurkan aspirasinya ke sekolah terutama dalam hal mendukung kebijakan operasional sekolah. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah dalam kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Fungsi lain yang perlu dikedepankan adalah dukungan secara finansial, saran-saran yang konstruktif demi kemajuan sekolah, serta fungsi kontrol dan mediator dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Komponen-komponen ini telah berjalan dengan baik.

Beberapa hal yang belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah keikutsertaan dalam menentukan kinerja dalam satuan pendidikan dan kriteria tenaga kependidikan, padahal keduanya memiliki peran yang amat penting dalam hal peningkatan mutu pendidikan.

Peran Kepala Sekolah

Peran kepala sekolah dalam mengembangkan kualitas guru, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan kurikulum, optimalisasi kemampuan akademik dan moral siswa, serta kerja-

sama dengan berbagai komponen sangat dibutuhkan. Pada umumnya, beberapa sekolah yang dijadikan sampel telah melakukan hal tersebut. Namun, ada aspek penting yang belum dilakukan oleh sekolah dalam hal penataan kelembagaan khususnya pengembangan prosedur dan mekanisme layanan sistem informasi dan sistem pelaporan melalui kegiatan evaluasi diri yang berbasis data. Dalam dunia sistem informasi manajemen yang berkembang dewasa ini, sebaiknya sistem informasi dan pelaporan evaluasi ini berbasis komputer dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting serta informasi sekolah kepada masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan Gubernur dan Bappeda

Beberapa hal yang perlu untuk diterapkan oleh gubernur dan bappeda antara lain: **pertama**, melakukan pemetaan terhadap mutu pendidikan daerah di tiap jenjang pendidikan supaya dapat dijadikan acuan sebagai titik tolak pengembangan pendidikan. **Kedua**, Bappeda bersama-sama dengan Diknas dapat menetapkan sasaran alokasi anggaran serta efisiensi penggunaan yang mengacu kepada skala prioritas. **Ketiga**, pengembangan pengelolaan sekolah yang kompetitif berbasis evaluasi diri dan akreditasi sekolah dalam rangka menjadikan sekolah yang transparan dan akuntabel.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebaiknya secara pro aktif turun ke lapangan dengan menyiapkan berbagai instrumen tentang pelaksanaan pendidikan dan beberapa aspek penting lainnya yang terkait dengan sektor pendidikan terutama yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaannya, DPRD harus berkoordinasi dengan sekolah, masyarakat, dan instansi yang terkait untuk membahas upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dinas Pendidikan Nasional

Beberapa hal yang perlu untuk diterapkan oleh Diknas antara lain: (1) melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu berkoordinasi dengan Bappeda dalam menyusun rencana sasaran pro-

gram. (2) Secara aktif Diknas harus berinisiatif untuk mendorong pemerintah daerah secara bersama-sama dengan DPRD melegalisasi program-program peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk Perda, sehingga menghasilkan komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Optimalisasi peran guru dalam menunjang kariernya melalui kegiatan *in service training* serta pemberian penghargaan kepada kepala sekolah, guru, dan elemen pendidikan yang terkait dengan cara mengaktifkan MGMP dan KKG melalui kegiatan yang berkelanjutan dan dapat dievaluasi pelaksanaannya. (4) Membangun *database* pendidikan yang berkaitan dengan upaya-upaya yang berkaitan peningkatan mutu yang dapat diakses oleh semua komponen yang terkait dengan program kerja serta kebijakan yang dikembangkan. (5) Menetapkan alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, misalnya adanya program guru kunjung untuk daerah-daerah yang APK rendah. (6) Membentuk tim pengembangan kurikulum tingkat kabupaten sehingga akselerasi implementasi kurikulum dapat terwujud. (7) Memberdayakan tugas dan fungsi pengawas sekolah untuk dapat menjamin kualitas pembelajaran dan manajemen di sekolah.

Dewan Pendidikan

Beberapa hal yang perlu untuk diterapkan oleh dewan pendidikan antara lain: (1) memberikan pertimbangan dan rekomendasi secara proaktif kepada Pemda atau DPRD dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. (2) Menjadi agen pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. (3) Mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan. (5) Menjadi mediator antara pemerintah dan DPRD dengan masyarakat.

Komite Sekolah

Beberapa hal yang perlu untuk diterapkan oleh komite sekolah antara lain: (1) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. (2) Menjadi agen pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (3) Mengontrol

dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan di sekolah. (4) Menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Kepala Sekolah

Beberapa hal yang perlu untuk diterapkan oleh kepala sekolah antara lain: **pertama**, membangun *database* sekolah berbasis komputer dengan format yang mengacu pada kepentingan perencanaan dan akreditasi sekolah. **Kedua**, membuat sistem informasi sekolah yang dapat diakses oleh masyarakat terutama terkait dengan informasi umum sekolah. **Ketiga**, menginternalisasikan evaluasi diri dan akreditasi bagi sekolah dalam rangka menuju kemandirian dan peningkatan daya saing sekolah. **Keempat**, membentuk tim pengembangan kurikulum yang bertugas mempercepat transformasi kebijakan perubahan kurikulum dari pemerintah pusat, provinsi ke guru-guru di sekolah.

KESIMPULAN

Profil kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu di propinsi Jambi memiliki beberapa karakteristik: **pertama**, provinsi Jambi belum memiliki Perda yang tertuang secara spesifik untuk mengayomi upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan. Keberadaan Perda ini diperlukan untuk dapat memberikan jaminan keberlanjutan program peningkatan mutu pendidikan.

Kedua, pemerintah provinsi Jambi masih terus berupaya untuk dapat meningkatkan anggaran pendidikan, sebagai wujud dari implementasi amandemen UUD 1945. **Ketiga**, kebijakan pendidikan yang dijalankan masih bersifat insidental sporadis dan belum terencana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pembangunan *database* yang belum berorientasi pada pengembangan mutu.

Keempat, koordinasi antara Bappeda dengan Diknas sangat diperlukan dalam menetapkan sasaran peningkatan mutu dan pengalokasian dana untuk pencapaian sasaran yang sudah ditentukan. **Kelima**, kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius se-

suai dengan PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Keenam, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam membangun mutu pendidikan perlu ditingkatkan dalam wadah komite sekolah dan dewan pendidikan. **Ketujuh**, memberdayakan pengawas sekolah sebagai agen pengontrol kualitas (*quality control*) pendidikan di satuan pendidikan perlu diintensifkan secara berkelanjutan. **Kedelapan**, satuan pendidikan perlu didorong untuk memiliki *income generating activities*, sehingga dapat dijadikan sumber dana untuk peningkatan mutu pendidikan. **Kesembilan**, kebijakan yang transparan dan akuntabel perlu diimplementasi secara luas, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan

SARAN

Penelitian ini telah mendapatkan profil kebijakan pendidikan, akan tetapi hasil ini hanya akan memberikan kontribusi yang signifikan jika ditindaklanjuti pada penjabaran rekomendasi kebijakan yang telah diformulasikan ke dalam program-program kerja yang sesuai dengan kewenangan LPMP provinsi Jambi dan Diknas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernandes, H. J. X. 1984. *Evaluation of Educational Program. National Education Planning, Evaluation and Curriculum Development*. Jakarta: tanpa penerbit
- Moegiadi. 1991. *Perhatian Khusus Terhadap Peserta Didik Berbakat*. Jakarta: Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional
- Tedjasudhana, L. D. 2005. Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Bahasa: Menjadi Bangsa yang Mendengar dan Didengar. *Jurnal Ilmu Pendidikan Parameter*, XXII (21): 28-38
- Umaedi. 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Depdikbud. Jakarta
- Pusbang Kurrandik Baliibang Depatremen Pendidikan dan Kebudayaan. Tanpa tahun terbit. *Profil Peserta Didik yang Memerlukan Perhatian Khusus dan yang Berkesulitan Belajar di SD dan SLTP*. Jakarta: Depdikbud